

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran Politik Islam dewasa ini tidak terlepas dari peran para pemikir sekaligus aktor politik Islam di dunia. Perubahan sosial dan politik yang terus terjadi di dunia Islam merupakan sebagian dampak dari meluasnya pengaruh pemikiran politik Islam tersebut. Terutama perbedaan pemikiran politik Islam antara sunni dan syiah tentang konsep sumber kepemimpinan Islam. Perbedaan tersebut muncul semenjak Nabi Muhammad Saw meninggal dunia sampai dengan saat ini.

Polemik tentang pengganti kepemimpinan Nabi berakhir pada dualisme antara yang sepakat atas pertemuan di Saqifah dengan mereka yang menentang pemilihan tersebut atau jelasnya anggota keluarga Nabi yang meyakini bahwa Nabi telah menunjuk Ali sebagai pemimpin umat selanjutnya. Maka dapat kita simpulkan yakni menurut John L. Esposito, bahwa perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan politik dan agama setelah meninggalnya Nabi Muhammad membaca pada pembagian Muslim menjadi dua cabang utama yaitu Sunni dan Syiah.<sup>1</sup>

Mengenai perbedaan dua pendapat ini yang kemudian masing-masing antara Sunni dan Syiah menghasilkan sistem pemerintahan Islam dengan sumber yang berbeda. Kelompok Syiah sebagai yang pertama kali

---

<sup>1</sup> John L. Esposito, *Islam Aktual; Jawaban atas Gejolak Masyarakat Post-Modern*, Depok, Inisiasi Press, 2002, Hlm. 41

mencetuskan teori Imamah sebagai suatu pemerintahan, yang juga merupakan rancangan Tuhan, suatu kepercayaan yang dianggap sebagai penegas keimanan.<sup>2</sup>

Sedangkan kelompok Sunni yang berpendapat bahwa persoalan kepemimpinan merupakan urusan umat dan diserahkan kepada umat disebabkan Nabi tidak pernah memberikan metode khusus dalam pergantian kepemimpinan, dan bersandar pada dalil al-Quran yakni dengan prinsip musyawarah kaum Sunni mencoba lebih jauh dengan memberikan suatu konsep kepemimpinan yang secara teori disebut dengan Khilafah. Suatu sistem pemerintahan yang tidak menganut pola kerajaan selayaknya kaum Syiah dengan prosesi pengangkatan pemimpin dengan metode pewarisan.

Menurut Roger Graudy, bahwa sebagai contoh al-Qur'an melarang kerajaan yang didasarkan atas hak ilahi dan teokrasi dalam arti dipakai orang di Barat, karena dalam Islam tidak ada kaum pendeta (*Rahbaniah*) dan tidak ada pula gereja yang berhak untuk bicara dan memerintah atas nama Tuhan. Selanjutnya dia mengatakan khilafah umpamanya, tidak menjadi turun temurun sebagai dinasti kecil sesudah meniru politik Romawi atau Persia Sasaniide.<sup>3</sup>

Mencermati perbedaan diatas maka sesungguhnya terjadi dua perbedaan dengan sumber yang berbeda atau perbedaan pemikiran tersebut timbul akibat dari kedua sumber yang digunakan berbeda antara kelompok Sunni dan Syiah.

Dengan demikian, penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan

<sup>2</sup> Khalil Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti. 1999, Hlm. 8

<sup>3</sup> Roger Garaudy, *Janji-janji Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1982, Hlm. 104

membandingkan perbedaan pemikiran politik tersebut dengan mengambil salah satu tokoh dari keduanya, yaitu Ali Syariati yang beraliran Syiah dan Taqiyyudin an-Nabhani dari Sunni.

Ali Syariati yang menaruh keyakinan pada pandangan dunia Islam yang menjadi dasar dalam suatu infrastruktur yang dimilikinya dan sekaligus bercorak ketuhanan.<sup>4</sup> Doktrin Syiah yang begitu lekat padanya menjadikan pemikiran Ali Syariati terkonstruksi sangat revolusioner dan progresif. konsepnya terutama dalam bidang politik ialah menentang penguasa-penguasa yang dzalim serta memberikan sistem kepemimpinan yang spiritualistik yang dibangun atas pondasi nubuwah atau kenabian.

Imamah sebagai suatu konsep kepemimpinan dalam Islam yang diberikan oleh Ali Syariati adalah suatu kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas pondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan manusia menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan.<sup>5</sup>

Sebagai suatu sistem kepemimpinan yang berasal dari konsep kenabian dengan proses yang turun-temurun (*Wirastah*) menjadikan Imamah sebagai suatu sistem kepemimpinan yang spiritualistik. Prosesi kepemimpinan yang merupakan suatu tuntutan serta memiliki legalitas ilahiyyah ini, kemudian Imamah menjadi sistem kepemimpinan yang imperatif bagi umat Islam khususnya dari golongan Syiah. Ali Syariati sebagai intelektual Islam di Iran

<sup>4</sup> Ali Syariati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, Bandung : Mizan. 1992, Hlm. 23

<sup>5</sup> *Ibid*, 65

mampu untuk memberikan gagasan cemerlangnya dalam konsepsi ini. Sebagai intelektual muda Syiah, beliau mampu untuk mengkritik bahkan menentang pemerintahan Syah Reza Pahlevi dalam tulisan-tulisannya dengan prinsip revolusioner Islam.

Berbeda dengan Taqiyyudin an-Nabhani seorang ulama kelahiran Turki ini kemudian memberikan pula konsepsi kepemimpinan Islam dengan model dan prosesi yang berbeda. Khilafah sebagai suatu sistem kepemimpinan Islam yang didalamnya menerapkan hukum-hukum Islam atau Syariah. Serta sebutan Khalifah sebagai pemimpin umat Islam yang sangat berbeda dengan sebutan Imam dari kalangan Syiah.

Khilafah yang merupakan lembaga pemerintahan Islam dalam konsepsi Taqiyyudin an-Nabhani ini pun memiliki rujukan serta argumentasi yang berdasar pada dalil al-Qur'an dalam merumuskan gagasannya tersebut. Menurut Taqiyyudin an-Nabhani, khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan, tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih khalifah.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis melihat bahwa an-Nabhani setidaknya memiliki prinsip demokrasi dalam prosesi pemilihan Khalifah, yang membuatnya berbeda dengan pemikiran politik Ali Syariati.

Walaupun memiliki kesamaan kewajiban dalam memberikan tugas, akan tetapi konsep dan prosesi kepemimpinan dari keduanya tentu berbeda. Pemerintahan Islam itu tidaklah mempunyai namanya tersendiri, tetapi

---

<sup>6</sup> Taqiyyudin an-Nabhani, *peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta: HTIPress.2001, Hlm. 159

mempunyai tugas tersendiri. Tugas ini memberi nama yang sifatnya melihat kepentingan agama berjalan dengan umat dan umat berada didalam agama.<sup>7</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran politik Ali Syariati dan Taqiyyudin an-Nabhani tentang Konsep Sumber Kepemimpinan Islam?
2. Bagaimana titik temu pemikiran Ali Syariati dan Taqiyyiddin an-Nabhani dengan sistem politik di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dengan melihat dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Mengetahui pemikiran politik Ali Syariati dan Taqiyyudin an-Nabhani tentang Konsep Sumber Kepemimpinan Islam.
2. Bagaimana titik temu pemikiran Ali Syariati dan Taqiyyiddin an-Nabhani dengan sistem politik di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam Islam menyangkut dalam Studi Kenegaraan dan politik Islam secara teoritis dalam penerapan serta memperluas wawasan keilmuan Islam.

<sup>7</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *pemikiran politik Islam*, (Jakarta.Pedoman Ilmu Jaya:1988), Hlm. 133

2. Penelitian ini pun diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang telah terjadi dalam perdebatan panjang konsep kepemimpinan Islam antara tokoh-tokoh Syiah didalamnya serta tokoh sunni yang dengan penelitian ini dapat secara luas mendeskripsikan serta membandingkan kedua tokoh tersebut.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Tom Bottomore, perubahan politik dalam bentuk tertentu berlangsung secara kontinu didalam setiap masyarakat dalam menanggapi berbagai kondisi internal dan eksternal yang terus berubah, yang meliputi hubungan dengan sifat dan masyarakat lainnya, interaksi-interaksi kelompok dimasing-masing masyarakat dan pergantian aktor secara berkesinambungan dengan surutnya generasi tua dan munculnya generasi baru. Dengan mendasarkan diri pada masyarakat yang dilibatkan ini, perubahan-perubahan politik cukup berarti dapat timbul dari diperkenalkannya suatu teknologi baru, perdagangan atau perang, kudeta istana, perubahan dinasti, tampilnya kepuncak kekuasaan raja yang kompeten atau tidak, ataupun karena munculnya pemimpin politik yang talentanya begitu hebat, gerakan-gerakan intelektual dan budaya, pasang surutnya kelompok-kelompok sosial tentu termasuk para elite yang menunjukkan kepentingan sosial yang berbeda.<sup>8</sup>

Melihat pada teori diatas kita bisa menganalisa perubahan politik yang ada pada masa sepeninggalnya Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi

---

<sup>8</sup>Tom Bottomore, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Bineka Cipta, 1992, Hlm. 82

Muhammad Saw wafat, gejolak politik menyebar dipermukaan tentang pengganti kepemimpinan Nabi, kemudian Muslimin terpecah menjadi dua kelompok politik. Pertama, kelompok yang mendukung keputusan Saqifah, yang mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah. Kedua, kelompok yang mendukung peristiwa Ghadir Khum, yang menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Diantara sahabat yang termasuk kelompok kedua adalah Ammar bin Yasir, Miqdad bin al-Aswad, Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Ibnu Tayyihan, Jabir bin Abdullah al-Anshari, Abu A'id al-Khudri, Khuzaymah Dzu al-Shahadatayn, Abdullah bin Abbas dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dua kelompok politik ini yang selanjutnya disebut sebagai Sunni dan Syiah. Seperti dijelaskan pada latar belakang diatas, perbedaan antara sunni dan syiah terletak pada sumber kepemimpinan, terkhusus penentuan pemimpin pasca-Nabi wafat. Oleh sebab itu, penulis melihat perbedaan mendasar terletak pada sumber yang digunakan.

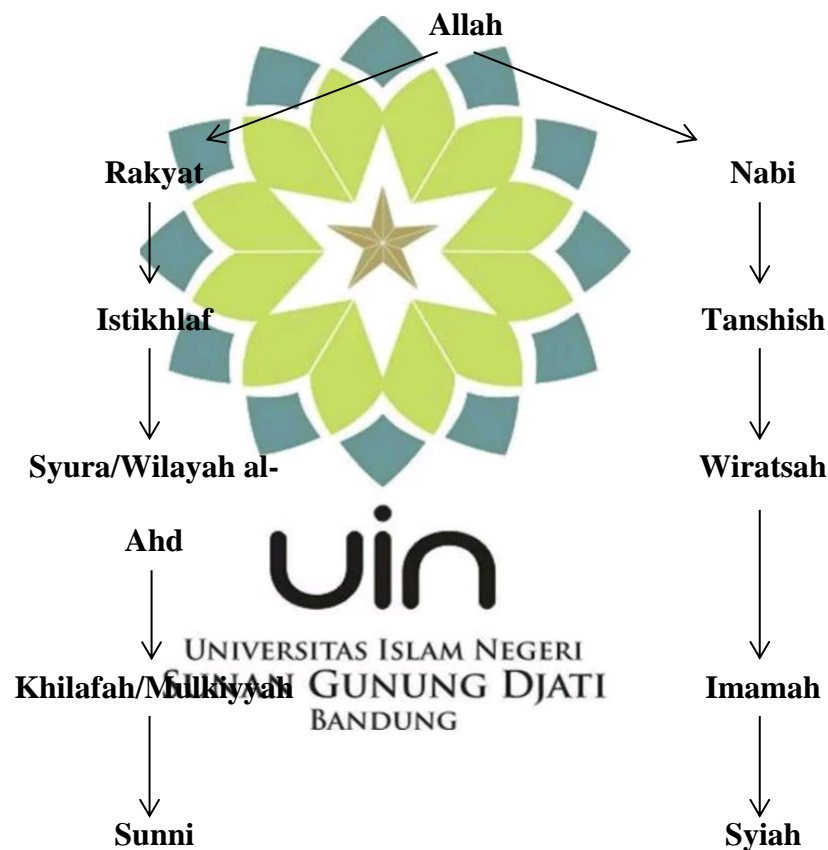
Menurut Ija Suntana, perbedaan politik sunni dan syiah terletak pada sumber kekuasaan, kalangan syiah memandang bahwa kekuasaan adalah hak yang ditentukan berdasarkan penunjukan. Dalam tradisi pemikiran syiah berkembang teori *tanshish* yaitu bahwa kekuasaan telah ditentukan secara pasti oleh suatu dalil. Teori tanshish menghasilkan

---

<sup>9</sup> Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi, Perspektif Wilayah al-Faqih*, Bandung: Mizan. 2009, Hlm. 30

sistem kewarisan (*wiratshah*) dalam sistem ketatanegaraan dan lembaga politik yang menjalankan sistem tersebut bernama Imamah.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam perspektif sunni, bahwa kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, kemudian dalam mekanisme pemilihan ditentukan dengan jalur musyawarah (*syura*) atau wilayah al-ahd, yang kemudian membentuk lembaga politik yaitu khilafah atau mulkiyyah (kerajaan).



Gambar 1.1 Sumber Kekuasaan Sunni dan Syiah<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustakasetia, 2010, Hlm.

<sup>11</sup> Ibid. Hlm.



Mencermati perbedaan dalam pola dan sistem politik dari keduanya, terlebih dahulu kita mesti memahami pandangan dan argumentasi antara sunni dan syiah tentang konsep ketatanegaraan Islam. Pandangan dan argumentasi tentang sumber kepemimpinan yang membentuk konsep ketatanegaraan Islam, bahwa syiah meyakini Imamah tidak hanya suatu sistem pemerintahan melainkan rancangan Tuhan, suatu kepercayaan yang dianggap sebagai penegas keimanan.<sup>12</sup>

Aspek kemutlakan konsep syiah tentang Imamah tersebut didasarkan pada asumsi bahwa syariat tidak akan berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak yang berfungsi memelihara serta menafsirkan pengertian yang benar dan murni terhadap syariat itu. Setelah memandang keterbatasan-keterbatasan ketidaksempurnaan akal manusia, kaum syiah mengatakan bahwa orang yang memenuhi syarat untuk berperan sebagai pelindung dan penafsiran hukum Tuhan hanyalah perantara supramanusiawi yang diberi petunjuk oleh Pencipta hukum tersebut.

Karenanya, kaum syiah mengembangkan teori mereka tentang Imamah segaris dengan ketentuan Imam yang dipilih oleh Tuhan dan bukan hasil pilihan ummat (manusia). Perilaku Tuhan itu disebut *Luft* atau Rahmat (Grace), sedang urutan Imam-imam yang ditunjuk Allah dikenal dengan Istilah Imamah. Kaum syiah berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw atas perintah Allah Swt, menunjuk Ali sebagai Imam pertama sampai

---

<sup>12</sup> Khalil Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, Hlm. 8

kemudian Ali menunjuk penerusnya dan demikian sampai dengan Imam yang ke-12, yaitu Imam Mahdi.<sup>13</sup>

Menurut Sayid Mujtaba Musawi Lari, seorang ulama besar syiah menyatakan bahwa, pada saat Rasulullah kembali dari Haji Wada yakni bulan Dzulhijah hari ke-18 telah menetapkan pengganti dan penerusnya sesuai dengan perintah Tuhan. Hal tersebut berdasarkan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 67, Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (*gangguan*) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (Qs. Al-Maidah : 67)

Ayat ini disampaikan ketika memasuki lembah Ghadir Khum, kemudian malaikat Jibril turun dan menyampaikan pesan bahwa Nabi harus segera mengumumkan pewaris atau penggantinya.<sup>14</sup>

Selanjutnya, kaum syiah menyatakan tentang pengangkatan Ali sebagai pemimpin umat Islam pada saat khutbah Nabi di Ghadir Khum, yaitu tentang hadis Nabi yang terkenal dalam kalangan syiah yang disebut Hadis Tsaqalain yang menjadi rujukan kaum syiah agar berpedoman terhadap keluarga Nabi (*ahlul bait*).<sup>15</sup> Nabi Muhammad Saw, Bersabda, “*Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka berat, yaitu Kitab Allah dan Itrah (orang-orang pilihan), dari keturunannya*”.

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 8

<sup>14</sup> Sayid Mujtaba Musawi Lari, *Imam Penerus Nabi Muhammad Saw*, Jakarta: Lentera, 2004. Hlm 39

<sup>15</sup> Murtada Muthahari, *Imamah dan Khilafah*, Yogyakarta, rausyanfikir, 2012, Hlm. 19

Nabi Muhammad Saw, kemudian meneruskan khutbahnya yang panjang dihadapan kaum Muslimin dan pada akhirnya Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib untuk berdiri disamping Nabi, dan seraya memegang dan mengangkat tangan Ali, Nabi berkata :

“Wahai manusia siapa diantara orang-orang beriman itu yang lebih mulia?, mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui yang lebih baik!” beliau melanjutkan:”siapapun yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya”<sup>16</sup>

Dalil diatas menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan kepemimpinan kaum Syiah berawal dari Tuhan yang kemudian menyampaikannya kepada Nabi dan dengan demikian atas perintah Tuhan, Nabi menunjuk kepemimpinan setelahnya kepada Ali untuk terus melanjutkan risalahnya.

Berbeda dengan pandangan kaum sunni terhadap konsep sumber kepemimpinan, terutama setelah Nabi Muhammad wafat, bahwa Nabi tidak pernah memberikan contoh pergantian pemimpin. Namun, kalangan sunni tetap sepakat bahwa pengangkatan kepemimpinan merupakan kewajiban berdasarkan akal dan syariat seperti yang diuraikan oleh al-Mawardi.<sup>17</sup> Allah Swt berfirman

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَدَانَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>16</sup> Sayid Mujtaba Musawi Lari. *Op.cipt.* Hlm. 42

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta, Darul Falah, 2006. Hlm. 2

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa:59)

Menurut Muhammad Dhiaudin Rais, sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari Rasul Saw, yang menunjukan seseorang atau sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan. Klaim-klaim seperti ini muncul setelah pertemuan hari Saqifah dari golongan syiah yang secara fanatik loyal (*tasyasyu*) kepada Ali r.a serta keturunannya.<sup>18</sup>

Kelompok *Ahlul-Sunnah* atau sunni sepakat bahwa jalan menuju kekhilafahan yang konstitusional atau bahwa sumber kekuasaan khalifah dapat dicapai melalui prosedur pemilihan umum oleh umat, yang dicerminkan dengan prosedur pembaiatan.<sup>19</sup> Selain itu, kelompok sunni berpegang kepada dalil-dalil dalam al-Qur’an yang mewajibkan agar kaum muslimin memegang prinsip musyawarah agar terhindar dari kesewenangan.<sup>20</sup>

Adapun dalil yang mewajibkan kaum Muslim untuk bermusyawarah setidaknya ada dua ayat yang menyebutkannya secara jelas yaitu :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضُوا مِن حَوْلِكَ فَأُفٍّ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>18</sup> Muhammad Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001. Hlm. 129

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 129

<sup>20</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005. Hlm. 38

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan **bermusyawarahlah** dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (QS. Ali-Imran:159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan **musyawarah** antara mereka dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syura:38)

Ayat diatas menunjukkan tentang legitimasi kepemimpinan dengan jalur musyarah baik dengan jalur pemilihan umum dengan mekanisme *ahlul hal wal aqdi* atau *wilayah al-ahd*.

Kepemimpinan kaum sunni bersumber pada kedaulatan Tuhan yang kemudian diserahkan kepada rakyat dengan jalur syura atau wilayah al-ahd yang selanjutnya akan membentuk lembaga politik yang disebut sebagai Khilafah atau Mulkiyyah.

## F. Langkah-langkah penelitian

Dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dikenal ada dua paradigma besar yang melatar belakangi pemunculan berbagai aliran teori beserta metodologi penelitian sosial. Pertama, positivisme sebagai akar paradigma kuantitatif. Paradigma ini adalah tradisi pemikiran Prancis dan Inggris yang diantara lain di ilhami oleh David Hume, John Locke dan Berkeley yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan serta

memandang pengetahuan memiliki kesamaan hubungan dengan pandangan aliran Filsafat yang dikenal dengan Positivisme.<sup>21</sup>

Kedua, paradigma Jerman yang Kantian dan Hegelian tradisi pemikiran Jerman yang dipengaruhi oleh Plato lebih humanistik, memandang manusia sebagai manusia, serta lebih terobsesi dan dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme (idealisme Plato). Tradisi pemikiran Jerman yang lebih Platonik, humanistik dan idealistik, itulah yang merupakan akar tradisi pendekatan kualitatif.<sup>22</sup> Maka dengan hal tersebut penulis mencoba untuk melakukan metode kualitatif dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang tentunya tidak diperoleh melalui statistic atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan riwayat dan perilaku seseorang, disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik.<sup>23</sup> Sehingga penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah penelitian pustaka atau *library research* yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada relevansinya atau hubungannya dengan pembahasan tentang konsep sumber kepemimpinan dalam Islam khususnya dalam pemikiran Ali Syariati dengan Taqiyyudin an-Nabhani.

<sup>21</sup> Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 57

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 58

<sup>23</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, Hlm. 4

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, analitik dan komparatif yaitu dengan menguraikan hal-hal mengenai konsep sumber kepemimpinan islam khususnya dari kedua pemikiran tersebut antara Ali Syariati dengan Taqiyyudin an-Nabhani kemudian mengkaji secara cermat melalui uraian analisis lalu menjelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian. Metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi. Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan mempretasi tentang arti data itu.<sup>24</sup>

Studi komparatif merupakan penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecalan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain adalah penyelidikan yang bersifat komparatif.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Winarno Sukarhmad, *Penelitian Ilmiah-Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsito. 2004, Hlm. 139

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm, 143

### 3. Metode penggalian data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka maka metode yang digunakan adalah pengumpulan literature atau bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud. Karya paling memadai yang membahas pemikiran Ali Syariati adalah Ummah dan Imamah, Wasiat atau Musyawarah, membangun masa depan Islam, Islam; Mazhab aksi dan pemikiran, Fatimah az-Zahra, Abu Dzarr Suara Parau Menentang Penindasan, Para Pemimpin Mustadhafin, Islam Agama Protes, dan Doa, Tangisan dan Perlawanan. Karya ini membahas beberapa pemikiran Ali Syariati baik berupa tulisan langsung atau ceramah-ceramahnya yang dimuat dalam sebuah karya ilmiah yang membahas terkait pemikiran Islam, sosial, ekonomi dan terutama politik. Sedangkan sumber primer dari karya Taqiyyudin an-Nabhani yaitu Sistem pemerintahan Islam, Negara Islam (*Daulah Islamiyyah*), pembentukan Partai Politik Islam dan sistem hidup dalam Islam.

### 4. Analisis data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan analisis termasuk analisis data terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, analisis data ini menggunakan analisis :

- a. Induksi



Induksi dalam hal ini merupakan suatu langkah-langkah metode analisis data yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pabgkal pikirnya sehingga betul menurut bentuknya saja.<sup>26</sup>

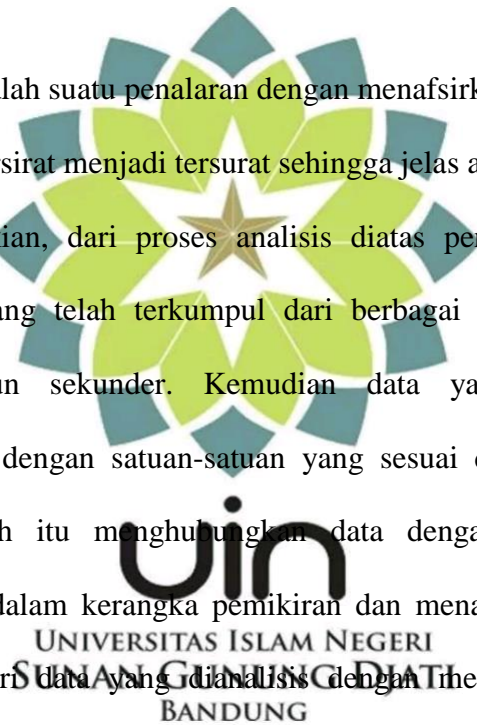
b. Deduktif

Deduktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi.<sup>27</sup>

c. Interpretasi

Interpretasi adalah suatu penalaran dengan menafsirkan atau mengeluarkan makna yang tersirat menjadi tersurat sehingga jelas apa yang dimaksud.

Dengan demikian, dari proses analisis diatas penulis dapat menelaah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer ataupun sekunder. Kemudian data yang telah terkumpul dikelompokkan dengan satuan-satuan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah itu menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran dan menafsirkan serta menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



<sup>26</sup> Surajiyo, *Ilmu-Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, Hlm. 24

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 25



**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG